**PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN
MELALUI PERBAIKAN KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU DI
SUMATERA BARAT**

Oleh : Sufyarma Marsidin dan Firman

Abstract

This research aimed at uncovering local government's efforts in (1) improving the quality of education by making the teachers able to understand learners, mastering learning materials, teaching learning activities learning evaluation; (2) inspiring society to give the quality of education their hands to improve through bettering the teachers welfare. The research population were regional government officers comprising of Head of Education and Staffs, Head of Teacher Training Center (BPG), Head of Elementary Schools, Head of Junior High Schools (SLTP), Heads of Senior High Schools (SLTA), as well as teachers residing both in towns and rural areas in West Sumatera Province. The samples were taken using "Two Stage Cluster Random Sampling" technique. The result of research showed that (1) regional government has made efforts in improving the quality of teachers through upgrading, training and taking higher education, in order to be able to understand the learners, master learning materials, better the teaching learning activities/processes, evaluate the teaching learning result, (2) regional government gave little effort in inspiring society to better the teachers' welfare by specific reward, creating feeling of security and establishing safety work condition as well.

A. Pendahuluan

Dewasa ini kualitas pendidikan di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, oleh sebab itu perlu diadakan reformasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berbagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan telah dilakukan pemerintah, seperti perbaikan kurikulum, melengkapi sarana dan prasarana, peningkatan kemampuan pengelola pendidikan dan melaksanakan penataran bagi guru-guru bahkan akhir-akhir ini memberikan kesempatan kepada guru-guru melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, keluhan mengenai persoalan mutu pendidikan masih ramai dibicarakan. Misalnya, masyarakat menyuarakan pengangguran semakin banyak, persaingan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi terasa semakin sulit akibat persyaratan tidak terpenuhi, masih banyak perilaku siswa di masyarakat yang tidak sesuai dengan kapasitasnya

sebagai peserta didik, dan lain-lain sebagainya. Kesemuanya ini merupakan sebagian indikasi bahwa mutu pendidikan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Nasanius (1998: 1) menjelaskan kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keengganan siswa untuk belajar. Profesionalisme guru dipengaruhi oleh dua yaitu: (1) faktor internal meliputi minat dan bakat dan (2) faktor eksternal, berkaitan dengan lingkungan sekitar, sarana prasarana, serta berbagai latihan yang telah diikuti guru. Selanjutnya Sumargi(1996:9) menjelaskan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih belum memadai, terutama dalam bidang keilmuannya.

Permasalahan profesi guru menurut Akadum (1999:2) disebabkan oleh : (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total, (2) rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan, (3) pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan, (4) masih belum smooth-nya perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru, (5) belum berfungsi PGRI sebagai organisasi profesi untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya.

Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia menuntut profesionalisasi guru dalam melaksanakan tugasnya. Arifin (2000) menjelaskan guru yang profesional dipersyaratkan mempunyai; (1) dasar ilmu yang kuat, (2) penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka, (3) pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan.

Sehubungan dengan uraian tersebut, terlihat kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kompetensi, profesionalisme dan kesejahteraan guru. Oleh sebab itu keamanan, advokasi, keselamatan dan martabat guru perlu mendapat perlindungan. Standarisasi kompetensi guru ditujukan untuk menetapkan ukuran penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai seorang guru. Hal ini sejalan dengan dikembangkannya kebijakan kurikulum yang berorientasi kompetensi. Penetapan kompetensi guru diharapkan guru menjadi lebih profesional dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola proses pembelajaran mengajar di sekolah. Standar dimaksud adalah seperangkat kemampuan yang dipersyaratkan bagi

pemangku jabatan profesi guru disetiap jenjang pendidikan. Guru masa datang dikondisikan memiliki kepercayaan diri bahwa karier dan kesejahteraannya, bukan ditentukan oleh pemerintah. Guru diangkat dan diberhentikan karena persyaratan profesionalitas dan bukan formalitasnya.

Guru dalam proses belajar mengajar berfungsi sebagai pengajar dan pendidikan, sehingga tanggung jawab kemajuan pendidikan sebagian besar terletak di tangan guru. Begitu besarnya peranan guru, sebagai pengajar dan pendidikan, kemajuan di bidang pendidikan sebagian besar tergantung kewenangan dan kemampuan guru. Fenomena yang ditemui di sekolah-sekolah dewasa ini, pihak pimpinan direpotkan oleh masalah guru, ketimbang persoalan peningkatan mutu dan pengembangan sekolahnya. Penurunan gairah dan kemauan guru mengajar akan berdampak terhadap hasil pendidikan, hal ini akibat dari dampak krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepercayaan yang melanda masyarakat Indonesia sejak tahun 1997 yang belum menunjukkan tanda-tanda pulih. Reformasi juga telah menggeliatkan guru melalui demonstrasi besar-besaran menuntut pemerintah agar memperbaiki nasib dan kesejahteraan guru, namun pemerintah lebih banyak diam ketimbang memperhatikan aspirasi guru. Sikap kurang tanggapnya pihak-pihak terkait terhadap nasib guru tersebut, mendorong timbulnya krisis motivasi guru mengajar. Disisi lain faktor dominan menyebabkan turunnya motivasi guru tersebut bersumber kepada gaji guru yang rata-rata rendah dan belum memadai, akibatnya guru mencari alternatif sumber penghasilan lain, kecilnya peluang bagi peningkatan karir, kecendrungan mengambil kredit cicilan uang di bank sehingga gaji yang diterima tiap bulannya relatif kecil

Peningkatan standar kompetensi guru perlu dilakukan seiring dengan upaya peningkatan kesejahteraan guru itu sendiri. Untuk tahun 2003 ini diambil kebijakan berupa peningkatan subsidi guru PNS serta pengawas sekolah dari RP. 75.000 menjadi Rp. 100.000/bulan. Pemberian honorarium kelebihan jam mengajar bagi guru PNS SLTP dan SLTA. Sedang diupayakan realisasi tunjangan fungsional guru dan pengawas sekolah secara terus menerus. Saat ini telah ditetapkan Keppres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kenaikan tunjangan tenaga kependidikan sebesar 50% dari tunjangan sebelumnya.

Berkaitan dengan hal itu, Dinas Pendidikan di daerah seharusnya memandang guru bukan bagian dari birokrasi, tetapi sebuah profesi mandiri yang menuntut peningkatan pengetahuan dan kualitas berpikir. Peningkatan kualitas profesi guru menyangkut kapasitas dan kemampuan sesuai perkembangan zaman, kemampuan berinovasi, mentransformasi pengetahuan, dan memaknai materi pengajaran sesuai dengan realita yang ada di masyarakat, mengabdikan secara total terhadap profesi guru, bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat.

Kualitas SDM guru yang rendah sering dikaitkan dengan masalah penghasilan dan penguasaan mereka terhadap ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman. Kondisi kesejahteraan seperti sekarang, sulit dimungkinkan guru berlangganan majalah, koran, menjelajah dunia internet, atau secara rutin membeli buku-buku yang bermutu untuk mengembangkan diri (M Ahsan, *Suara Merdeka*, 22/8/01).

Perbaikan kesejahteraan guru melalui peningkatan gaji tidak dapat berjalan sendiri, tanpa merumuskan pola perekrutan calon guru, pelatihan, atau peningkatan SDM. Sebagai konsekuensi dari besarnya gaji yang mereka terima masalah pendidikan bagi siswa merupakan tanggung jawab guru sepenuhnya. Siswa tidak perlu mencari tambahan les atau bimbingan. Tuntutan kualitas SDM yang lebih tinggi dari pelaksanaan pendidikan, menuntut guru harus memiliki komitmen terhadap tugas, keahlian kerja, daya tahan, daya juang, dan keteladanan moral bagi anak didik. Walaupun demikian perwujudan hal tersebut dapat dilakukan setelah peningkatan mutu kesejahteraan.

Kesejahteraan guru di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, sangat memprihatinkan. Di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand gaji guru sekira Rp 2 juta (222,00 dolar Amerika) di Vietnam sebesar Rp 1 juta (111,00 dolar Amerika), di Laos, Burma, dan Pakistan sebesar Rp 700 ribu (77,00 dolar Amerika). Di Belanda gaji guru sekitar Rp 11 juta - Rp 17 juta (2.500,00-4.000,00 gulden), di Amerika sebesar Rp 27,5 juta - Rp 36 juta (30.000,00-40.000,00 dolar Amerika), dan di Jepang sekira Rp 18 juta (200 ribu yen). Di negara maju, gaji guru umumnya lebih tinggi dari pegawai yang lain, sementara di Indonesia justru sebaliknya. Di Selandia Baru misalnya, gaji guru 185%

lebih besar dari gaji pegawai administrasi. Di Finlandia dan Swedia, 235% lebih besar dari gaji di sektor industri (Supriadi, 1999:48).

Kurangnya kesejahteraan yang diperoleh guru di Indonesia, mengakibatkan profesi guru merupakan jabatan yang kurang menarik bagi generasi terbaik bangsa. Mereka selalu membanding-bandingkan “imbalan” yang diterima guru dengan profesi lain yang menurut mereka “imbalannya” cukup menjanjikan. Akhirnya, input yang akan dibina untuk menjadi guru sebagian besar berasal dari orang-orang yang mempunyai kemampuan “menengah”, sehingga masih banyak guru yang dihasilkan belum sesuai dengan karakteristik guru yang dibutuhkan masyarakat.

Kondisi kesejahteraan guru yang masih kurang diperhatikan, dapat mewarnai kinerja guru-guru di sekolah. Surya (2002:3) mengatakan bahwa faktor mendasar yang terkait erat dengan kinerja profesional guru adalah “kepuasan kerja” yang berkaitan erat dengan “kesejahteraan para guru. Kepuasan ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor: (1) imbalan jasa, (2) rasa aman, (3) hubungan antar pribadi, (4) kondisi lingkungan kerja, dan (5) kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri.

Kesejahteraan guru perlu mendapat perhatian dari semua pihak termasuk masyarakat. Mengingat kondisi ekonomi negara kita akhir-akhir ini, maka beban ini tidak mungkin semuanya dipikul pemerintah. Masyarakat diharapkan lebih proaktif membantu pemerintah dalam menyikapi persoalan kesejahteraan guru. Bila proses pendidikan adalah tanggung jawab sekolah, pemerintah dan masyarakat, maka secara tidak langsung masyarakat juga ikut bertanggungjawab dalam meningkatkan kesejahteraan guru.

Kesejahteraan dan kualitas guru perlu mendapat perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini bertujuan mengungkapkan upaya pemerintah daerah memperbaiki mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat mengambil keputusan untuk peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru .

B. Metode Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yakni menggambarkan fakta dan data sebagaimana adanya. Populasi penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah terdiri : Kepala Bidang Tenaga Edukatif beserta staf, Kepala SD, SLTP, dan SLTA serta guru yang berada pada Kabupaten dan Kota Propinsi Sumatera Barat. Menghindari kesulitan dalam menyusun *sampling frame* secara individu serta menjangkau Kepala Bidang Tenaga Edukatif dan staf Dinas Pendidikan, Kepala SD, SLTP, dan SLTA serta guru secara individual, pengambilan sampel menggunakan teknik *Two Stage Cluster Random Sampling*. Kepala Bidang Tenaga Edukatif beserta, Kepala SD, SLTP, dan SLTA serta guru Sumatera Barat diklasifikasi ke dalam dua strata, stratum berada di perkotaan dan kabupaten. Kabupaten yang terpilih sebagai lokasi penelitian adalah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukittinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuessioner. Data yang sudah dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan teknik persentase.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan pengolahan data yang telah dikumpulkan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

a. Upaya Pemerintah Memperbaiki Mutu Pendidikan Melalui Peningkatan Kualitas Guru

Upaya pemerintah memperbaiki mutu pendidikan melalui peningkatan kualitas guru tergambar pada Tabel 1 .

Tabel 1
Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pemahaman Guru Terhadap Peserta Didik

No	Indikator	SS		SR		JR		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Pelatihan pemahaman perbedaan individual siswa.	8	13,3	35	58,3	15	25	2	3,3
2	Penataran keterampilan membantu perkembangan	10	16,7	25	41,7	22	36,7	3	5
3	Bimbingan melaksanakan diagnostik kesulitan belajar	18	30	25	41,7	17	28,3	0	0
4	Bimbingan menyelesaikan kesulitan belajar siswa.	20	33,3	27	45	10	16,7	3	5
	Rata-rata		23,3		46,7		26,7		3,3

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diperoleh keterangan sebanyak 46,7% responden berpandangan pemerintah daerah sering berupaya meningkatkan pemahaman guru terhadap peserta didik, selanjutnya sebanyak 23,3% berpandangan sering sekali melakukan upaya, 26,7% responden berpandangan jarang dan 3,3% responden berpandangan tidak pernah pemerintah daerah melakukan upaya meningkatkan pemahaman guru terhadap peserta didik yang diajarnya. Dengan demikian sebagian besar responden (70%) berpandangan pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan pemahaman guru terhadap peserta didik.

Apabila ditelusuri lebih lanjut upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas guru menguasai materi yang akan diajarkan, terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Upaya Pemerintah Meningkatkan Kemampuan Guru dalam Menguasai Materi yang akan Diajarkan.

No	Indikator	SS		SR		JR		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Bimbingan dalam memotivasi siswa.	28	46,7	3	38,3	7	11,7	2	3,3
2	Melengkapi buku pegangan guru	30	50	19	31,7	8	13,3	3	5
3	Bimbingan penguasaan materi	17	28,3	31	51,7	12	20	0	0
4	Menyediakan bahan bacaan yang menunjang materi pengajaran .	19	31,7	22	36,7	15	25	4	6,7
	Rata-rata		39,2		39,6		17,5		3,8

Berdasarkan Tabel 2 di atas, diperoleh keterangan sebanyak 39,6% responden berpandangan pemerintah daerah sering berupaya meningkatkan kemampuan guru menguasai materi yang akan diajarkan. Selanjutnya sebanyak 39,2% responden berpandangan pemerintah daerah sering sekali berupaya, 17,5% berpandangan jarang pemerintah daerah berupaya dan 3,8% berpandangan pemerintah daerah tidak pernah berupaya meningkatkan kemampuan guru menguasai materi yang akan diajarkan. Dengan demikian sebagian besar (78,8%) responden berpandangan pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kemampuan guru menguasai materi yang akan diajarkan.

Upaya pemerintah daerah meningkatkan kemampuan guru memperbaiki kegiatan belajar-mengajar, terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Upaya Pemerintah Daerah Meningkatkan Kemampuan Guru
dalam Memperbaiki Kegiatan Belajar-Mengajar

No	Indikator	SS		SR		JR		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Pelatihan dalam menganalisis materi pelajaran.	18	30	25	41,7	15	25	2	3,3
2	Pelatihan pementapan keterampilan mengajar	18	30	26	43,3	13	21,7	3	5
3	Bimbingan mengelola kelas	20	33,3	23	38,3	17	28,3	0	0
4	Pelatihan penggunaan media pengajaran	10	16,7	32	53,3	15	25	3	5
5	Bimbingan menciptakan situasi kelas yang kondusif	12	20	25	41,7	20	33,3	3	5
6	Pelatihan membuat/menyiapkan alat bantu pengajaran.	14	23,3	22	36,7	23	38,3	1	1,7
7	Menyediakan buku pedoman memberikan pengajaran perbaikan.	18	30	26	43,3	12	20	4	6,7
	Rata-rata		39,2		39,6		27,4		3,8

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diperoleh keterangan 39,6% responden berpandangan pemerintah daerah sering berupaya meningkatkan kemampuan guru

dalam memperbaiki kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya 39,2% responden berpandangan pemerintah daerah sering sekali berupaya, 27,4% pemerintah daerah jarang berupaya dan 3,8% responden berpandangan pemerintah daerah tidak pernah berupaya meningkatkan kemampuan guru dalam memperbaiki kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian sebagian besar responden (78,8%) berpandangan pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kemampuan guru dalam memperbaiki kegiatan belajar-mengajar.

Upaya pemerintah daerah meningkatkan kemampuan guru melaksanakan evaluasi pengajaran, terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Upaya Pemerintah Meningkatkan Kemampuan Guru
Melaksanakan Evaluasi Pengajaran

No	Indikator	SS		SR		JR		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Menyediakan buku pedoman bagi guru dalam mengajar	12	20	28	46,7	17	28,3	3	5
2	Memberikan petunjuk tentang penyusunan evaluasi	17	28,3	29	48,3	11	18,3	3	5
3	Melengkapi buku petunjuk tentang pelaksanaan evaluasi pengajaran yang baik.	15	25	30	50	13	21,7	2	3,3
4	Memberikan bimbingan kepada guru tentang analisis evaluasi pengajaran	15	25	31	51,7	11	18,3	3	5
5	Pelatihan penyusunan kisi-kisi evaluasi pengajaran.	11	18,3	26	43,3	22	36,7	1	1,7
6	Bimbingan cara mengolah hasil evaluasi pengajaran.	15	25	27	45	13	21,7	5	8,3
7	Bimbingan dalam menginterpretasikan hasil evaluasi pengajaran.	13	21,7	28	46,7	13	21,7	6	10
	Rata-rata		23,3		47,4		23,8		5,5

Berdasarkan Tabel 4 di atas, diperoleh keterangan sebanyak 47,4% responden berpandangan pemerintah daerah sering berupaya meningkatkan kemampuan guru melaksanakan evaluasi pengajaran. Selanjutnya sebanyak 23,3% responden berpandangan pemerintah daerah sering sekali melakukan upaya, 23,8% jarang dan 5,5% tidak pernah berupaya meningkatkan kemampuan guru melaksanakan evaluasi

pengajaran. Dengan demikian sebagai besar (70,7%) berpandangan pemerintah daerah telah melakukan upaya meningkatkan kemampuan guru melaksanakan evaluasi pengajaran.

Bertitik tolak dari uraian tersebut dapat disimpulkan pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas guru, menyangkut dengan pemahaman terhadap peserta didik, penguasaan materi yang akan diajarkan, memperbaiki kegiatan belajar-mengajar, serta melaksanakan evaluasi pengajaran. Walaupun demikian upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas guru belum optimal.

b. Upaya Pemerintah Daerah Menggerakkan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru

Upaya pemerintah daerah menggerakkan masyarakat meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kesejahteraan guru, terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5.

Upaya Pemerintah Menggerakkan Masyarakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru melalui Pemberian Imbalan Jasa

No	Indikator	SS		SR		JR		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Bantuan dana dari masyarakat untuk menambah insentif guru-guru	8	13,3	2	3,3	21	35	29	48,3
2	Dunia usaha memberikan bantuan dana untuk menambah insentif guru.	2	3,3	3	5	17	28,3	38	63,3
3	Dunia industri memberikan bantuan dana untuk menambah insentif guru.	2	3,3	1	1,7	16	26,7	41	68,3
4	Komite sekolah memberikan bantuan dana untuk menambah insentif guru.	7	11,7	9	15	18	30	26	43,3
5	Dunia usaha memberikan bantuan dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru.	1	1,7	2	3,3	18	30	39	65
6	Dunia industri memberikan bantuan dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru.	1	1,7	1	1,7	16	26,7	42	70
	Rata-rata		5,8		5		29,5		59,7

Berdasarkan Tabel 5 di atas, ditemukan sebanyak 59,7% responden berpandangan pemerintah daerah tidak pernah menggerakkan masyarakat dalam pemberian imbalan jasa dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Selanjutnya sebanyak 29,5% berpandangan pemerintah daerah jarang menggerakkan masyarakat untuk memberikan imbalan jasa, 5,8% berpandangan sering sekali dan 5% berpandangan sering menggerakkan masyarakat memberikan imbalan jasa dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Dengan demikian sebagian besar responden (89,2%) berpandangan pemerintah daerah kurang menggerakkan masyarakat dalam pemberian imbalan jasa untuk peningkatan kesejahteraan guru.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, upaya pemerintah daerah menggerakkan masyarakat menciptakan rasa aman untuk meningkatkan kesejahteraan guru terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6.

Upaya Pemerintah Daerah Menggerakkan Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan Guru dengan Cara Memberikan Rasa Aman

No	Indikator	SS		SR		JR		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Menjamin rasa aman guru di lingkungan tempat tinggalnya.	21	35	15	25	16	26,7	8	13,3
2	Menanggapi secara positif disiplin sekolah yang diterapkan oleh guru.	27	45	22	36,7	11	18,3	0	0
	Rata-rata		40		30,8		22,5		6,7

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diperoleh keterangan sebanyak 30,8% responden berpandangan pemerintah daerah sering menggerakkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memberi rasa aman. Selanjutnya 40% responden berpandangan pemerintah daerah sering sekali menggerakkan masyarakat, 22,5% berpandangan jarang dan 6,7% berpandangan tidak pernah pemerintah daerah menggerakkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memberi rasa aman. Dengan demikian sebagian besar responden (70,8%) berpandangan pemerintah daerah telah menggerakkan masyarakat meningkatkan kesejahteraan guru dengan menciptakan rasa aman.

Upaya pemerintah menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memperbaiki kondisi kerja terlihat pada Tabel 7

Tabel 7

Upaya Pemerintah Menggerakkan Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan Guru dengan Memperbaiki Kondisi Kerja

No	Indikator	SS		SR		JR		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Penyediaan sarana pengajaran oleh orang tua murid	8	13,3	18	30	18	30	16	26,7
2	Penyediaan sarana pengajaran oleh dunia usaha.	1	1,7	1	1,7	22	36,7	36	60
3	Penyediaan sarana pengajaran oleh dunia industri.	1	1,7	2	3,3	19	31,7	38	63,3
4	Menyediakan rumah dinas.	17	28,3	6	10	7	11,7	30	50
5	Menyediakan ruangan kerja	10	16,7	8	13,3	15	25	27	45
6	Menyediakan ruangan BK	16	26,7	13	21,7	13	21,7	18	30
7	Menyediakan ruangan UKS	25	41,7	16	26,7	7	11,76	12	20
8	Menyediakan perpustakaan.	30	50	14	23,3	11	18,3	5	8,3
9	Menyediakan laboratorium.	20	33,3	9	15	12	20	19	31,7
10	Menyediakan ruangan PMR	10	16,7	12	20	16	26,7	22	36,7
11	Membagi tugas/beban mengajar guru sesuai keahlian	26	43,3	16	26,7	12	20	6	10
12	Membagi tugas guru sesuai beban mengajar yang sudah ditetapkan.	28	46,7	18	30	11	18,3	3	5
13	Mendukung program sekolah .	20	33,3	21	35	11	18,3	8	13,3
14	Mendukung program kurikulum.	20	33,3	25	41,7	12	20	3	5
15	Mendukung program kesiswaan .	18	30	28	46,7	12	20	2	3,3
16	Mendukung program peningkatan sarana belajar	14	23,3	32	53,3	12	20	2	3,3
17	Mendukung program peningkatan SDM.	18	30	30	50	10	16,7	2	3,3
18	Mendukung program pembinaan hubungan sekolah -masyarakat	24	40	26	43,3	8	13,3	2	3,3
19	Komite sekolah mendukung program sekolah	26	43,3	26	43,3	5	8,3	3	5
20	Membina silaturahmi guru.	24	40	28	46,7	6	10	2	3,3
			29,7		29,1		19,9		21,3

Berdasarkan tabel 7 di atas, diperoleh keterangan sebanyak 29,7% responden mengungkapkan sering sekali pemerintah daerah menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memperbaiki kondisi kerja guru. Selanjutnya 29,1% responden berpandangan pemerintah daerah sering , 21,3% berpandangan pemerintah daerah tidak pernah dan 19,9% pemerintah daerah jarang menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memperbaiki kondisi kerja guru. Dengan demikian sebagian besar responden (58%) berpandangan pemerintah daerah telah menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memperbaiki kondisi kerja guru.

Upaya pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memperlancar pengembangan karir terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.

Upaya Pemerintah Daerah Menggerakkan Masyarakat Meningkatkan Kesejahteraan Guru dengan Memperlancar Pengembangan Karir Guru

No	Indikator	SS		SR		JR		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Dunia usaha memberikan bantuan belajar bagi guru yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.	3	5	3	5	17	28,3	37	61,7
2		2	3,3	4	6,7	15	25	39	65
3	Dunia usaha memberikan fasilitas belajar kepada guru yang melanjutkan pendidikan	40	66,7	13	21,7	5	8,3	2	3,3
4	Membantu kelancaran kenaikan pangkat guru	8	13,3	18	30	19	31,7	15	25
	Mengundang orangtua siswa membicarakan tentang kualitas guru.								
			22,2		15,8		23,3		38,7

Berdasarkan Tabel 8 di atas, diperoleh keterangan sebanya 38,7% responden berpandangan pemerintah daerah tidak pernah berupaya menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memperlancar pengembangan

karir. Selanjutnya 23,3% responden berpandangan pemerintah daerah jarang menggerakkan masyarakat, 22,2% sering sekali pemerintah menggerakkan masyarakat dan 15,8% sering menggerakkan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memperlancar pengembangan karirnya. Dengan demikian sebagian besar responden (62%) berpandangan pemerintah daerah belum meningkatkan kesejahteraan guru dengan cara memperlancar pengembangan karirnya.

Usaha pemerintah daerah menggerakkan masyarakat memperbaiki kesejahteraan guru terlihat pada Tabel 9.

Tabel 9.

Aktifitas Pemerintah Daerah Menggerakkan Masyarakat Untuk Memperbaiki Kesejahteraan Guru Kesejahteraan Guru

No	Indikator	SS		SR		JR		TP	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Mengundang orangtua siswa ke sekolah guna membicarakan perbaikan kesejahteraan guru	10	16,7	12	20	16	26,7	22	36,7
2	Mencari donatur untuk membantu perbaikan kualitas guru.	5	8,3	13	21,7	16	26,7	26	43,3
3	Mencari donatur untuk membantu perbaikan kesejahteraan guru	5	8,2	10	16,7	12	20	33	55
4	Membantu guru mencari peluang memasarkan produk guru-guru.	1	1,7	8	13,3	16	26,7	35	58,3
5	Mengajak orangtua siswa dan dunia usaha secara tertulis untuk memperbaiki kesejahteraan guru	2	3,3	8	13,3	16	26,7	34	56,7
6	Mengajak orang tua siswa dan dunia usaha melalui media elektronik untuk memperbaiki kesejahteraan guru.	1	1,7	2	3,3	17	28,3	40	66,7
	Rata-rata		6,6		14,7		25,8		52,8

Berdasarkan Tabel 9 di atas, diperoleh keterangan sebanyak 52 % responden berpandangan pemerintah daerah tidak pernah melakukan aktifitas menggerakkan masyarakat memperbaiki kesejahteraan guru . Selanjutnya 25,8% responden berpandangan jarang, 14,7% berpandangan sering dan 6,6% berpandangan sering sekali.pemerintah daerah melakukan aktifitas memperbaiki kesejahteraan guru.

Dengan demikian sebagian besar responden (78,6%) berpandangan pemerintah daerah belum melakukan aktifitas memperbaiki kesejahteraan guru.

c. Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan melalui Perbaikan Kualitas dan Kesejahteraan Guru.

Upaya pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru terlihat pada Tabel 10.

Tabel 10.

Upaya Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Perbaikan Kualitas dan Kesejahteraan Guru

No.	Indikator	SS	SR	JR	TP
1	Pemahaman guru terhadap perbedaan individual	23,3	46,7	6,7	3,3
2	Penguasaan materi yang diajarkan	39,2	39,6	17,5	3,8
3	Memperbaiki kegiatan belajar-mengajar	26,2	42,6	27,4	3,8
4	Melaksanakan evaluasi pengajaran	23,3	47,4	23,8	5,5
5	Meningkatkan kesejahteraan melalui imbalan jasa	5,8	5	29,5	59,7
6	Kesejahteraan dengan memberikan rasa aman	40	30,8	22,5	6,7
7	Memperbaiki kondisi kerja guru	29,7	29,1	19,9	21,3
8	Memperbaiki kondisi kerja guru	22,2	15,8	23,3	38,7
9	Kegiatan pemerintah menggerakkan masyarakat	6,6	14,7	25,8	52,8
	Rata-rata	24,02	30,2	24,04	21,74

Berdasarkan Tabel 10 di atas, diperoleh keterangan sebanyak 30,2% responden berpandangan pemerintah daerah sering melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Selanjutnya sebanyak 24,02% sering sekali melakukan upaya, 24,04% jarang melakukan upaya dan 21,74% tidak pernah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru. Dengan demikian pemerintah daerah belum berupaya secara maksimal memperbaiki kualitas dan kesejahteraan guru. Hal ini ditunjukkan sebagian responden (54,04%)

berpandangan pemerintah daerah sudah melakukan upaya dalam perbaikan kualitas dan peningkatan kesejahteraan guru. Sedangkan sisanya berpandangan pemerintah daerah belum melakukan upaya dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

2. Pembahasan

Berdasarkan temuan penelitian diperoleh keterangan, sebagian responden (54,04%) berpandangan pemerintah daerah sudah melakukan upaya dalam perbaikan kualitas dan peningkatan kesejahteraan guru. Sehubungan dengan hal itu, upaya pemerintah dalam perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru belum optimal, hal ini ditunjukkan sebanyak 45,96% responden berpandangan pemerintah belum melakukan perbaikan terhadap kualitas dan kesejahteraan guru.

Apabila dikaji lebih lanjut berdasarkan penelitian, ditemukan sebagian besar responden (78,6%) berpandangan pemerintah daerah belum melakukan aktifitas untuk memperbaiki kesejahteraan guru. Sedangkan dalam peningkatan kualitas guru, responden berpandangan pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas guru, menyangkut dengan: pemahaman terhadap peserta didik, penguasaan materi yang akan diajarkan, memperbaiki kegiatan belajar-mengajar, serta melaksanakan evaluasi pengajaran melalui pelatihan, penataran dan pendidikan lanjutan.

Temuan tersebut di atas, menunjukkan pemerintah daerah lebih terfokus memperbaiki kualitas dengan melakukan penataran, pelatihan dan bimbingan terhadap guru. Aktifitas-aktifitas menggerakkan masyarakat dan dunia usaha meningkatkan kesejahteraan guru belum pernah dilakukan. Kondisi-kondisi ini menyebabkan permasalahan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dibebankan kepada pemerintah semata. Gerakan-gerakan mencari terobosan baru dengan memberikan perlakuan istimewa kepada guru mendapatkan pelayanan lebih murah dalam berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan, memanfaatkan sarana transportasi umum, asuransi kesehatan, peminjaman dengan bunga lunak dari Bank serta perumahan, tidak pernah dilakukan.

Perlakuan pemerintah daerah kepada guru sama dengan pegawai lainnya dan pekerjaan sebagai guru di daerah tidak diberiperlakukan sesuai dengan keprofesional

melekat dengannya. Kesejahteraan yang dibutuhkan guru mencakup aspek imbal jasa, rasa aman, kondisi kerja, hubungan antar pribadi dan pengembangan karir. Imbalan jasa baik yang bersifat materi, berupa gaji, guru ditemukan kesejangan dengan profesional lainnya. Sedangkan imbalan non-materi harus diakui masih jauh dari memberikan kepuasan. Meskipun diakui harkat dan martabat guru bukan terletak pada aspek materi atau simbol-simbol lahiriah, namun kenyataan masa kini umumnya manusia menilai seseorang dari aspek materi dan penampilan lahiriahnya.

Guru belum memperoleh gaji dan tunjangan lainnya untuk menopang kehidupan dan profesinya secara layak. Keadaan seperti itu, menyebabkan mereka yang potensial menjadi guru tidak tertarik untuk menjadi guru karena aspek ekonominya yang kurang merangsang.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut: (1) pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas guru, melalui : (a) peningkatan pemahaman terhadap peserta didik, (b) peningkatan kemampuan guru dalam menguasai materi ajar, (c) peningkatan kemampuan guru dalam menguasai materi yang akan diajarkan, (d) peningkatan kemampuan guru dalam memperbaiki kegiatan belajar-mengajar serta (e) peningkatan kemampuan guru melaksanakan evaluasi pengajaran, (2) pemerintah daerah kurang berupaya menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dalam hal : (a) pemberian imbalan jasa, (b) meningkatkan kesejahteraan guru dengan menciptakan rasa aman, (c) memperbaiki kondisi kerja guru, (d) memperlancar pengembangan karirnya, (3) . upaya perbaikan kualitas dan kesejahteraan guru belum dilaksanakan pemerintah daerah secara optimal. Hal ini diungkapkan 54,04% responden bahwa pemerintah daerah sudah melakukan upaya dalam perbaikan kualitas dan peningkatan kesejahteraan guru. Sedangkan sisanya mengungkapkan pemerintah

daerah belum melakukan upaya dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan saran sebagai berikut : (1) penataran dan pelatihan yang dilaksanakan dalam peningkatan kemampuan guru kurang efektif, karena tidak dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan. Dinas pendidikan bersama Dinas Tenaga Kerja, UNP, Unand dan Balitbang dirasa perlu melakukan analisis kebutuhan penataran dan pelatihan yang dibutuhkan guru untuk peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Barat, (2) kepedulian siswa, masyarakat dan dunia usaha akan kewibawaan profesi guru semakin melemah. Dinas Pendidikan dan Infokom dirasa perlu melakukan gerakan kepedulian guru dalam peningkatan kualitas SDM di daerah, (3) penyebaran guru yang tidak merata antara satu Kabupaten/Kota, sekolah dengan sekolah. Dinas pendidikan dirasa perlu melakukan registrasi ulang guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah sesuai dengan bidang studi yang diajarkan serta kebutuhan sekolah., (4) pembinaan guru dan sistem promosi belum dapat meningkatkan kualitas guru, karena tidak didasarkan oleh prestasi dalam tugas mengajarnya. Dinas pendidikan, Dinas tenaga kerja, Balitbang, Unand, UNP, Unand dirasa perlu merumuskan pola pembinaan dan promosi guru, (5) penyediaan peralatan dan fasilitas pendidikan belum memadai, seperti alat peraga, alat praktik, perpustakaan sekolah, dan prasarana olahraga. Dinas pendidikan, Perindustrian dan Perdagangan PLN, PDAM, Pos dan Giro, HIPMI dirasa perlu berkoordinasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan fasilitas pendidikan, (6) dukungan masyarakat dan swasta masih lemah dalam peningkatan kesejahteraan guru. Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan, Asuransi, Perbankan dirasa perlu menggerakkan masyarakat dan dunia usaha untuk memberikan kemudahan kepada guru dalam memperoleh kredit perumahan dengan bunga lunak, kendaraan, serta diskon dalam menggunakan sarana transportasi umum serta belanja di pusat perbelanjaan, (7). guru belum

memperoleh gaji dan tunjangan lainnya untuk menopang kehidupan dan profesinya secara layak. Dinas pendidikan dan Tenaga Kerja dirasa perlu mengkaji ulang tunjangan yang diberikan kepada guru sesuai dengan keahlian, beban tugas dan daerah tempat bertugas, (8) keamanan kerja guru atas perlakuan siswa, orang tua/masyarakat tidak jarang mengganggu ketentraman guru melaksanakan tugasnya dengan baik di sekolah. DPRD, Biro Hukum, Polisi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dirasa perlu memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya, (9) guru dalam proses belajar mengajar belum menjalankan fungsi sebagai pengajar dan pendidikan, sehingga kurang bertanggung jawab dalam mencapai kemajuan pendidikan di sekolah. Dinas pendidikan dan Tenaga Kerja perlu merumuskan kembali tugas dan fungsi guru, serta jam bekerja yang wajib dilaksanakannya di sekolah, (10) guru mengajar tanpa persiapan yang matang dan sekedar menyampaikan materi ajar, mengajar terasa monoton, kurang motivasi melaksanakan tugas, komitmen dan kinerja guru rendah dan beranggapan sudah jadi pegawai negeri tidak akan diberhentikan. Dinas pendidikan dirasa perlu melanjutkan pengangkatan guru kontrak serta mekukan pegawas, mengevaluasi ulang guru-guru tetap serta menetapkan kriteria guru yang dibutuhkan dalam pengembangan SDM di sekolah-sekolah, (11) sistem pengelolaan sekolah masih lemah, penempatan guru kurang merata dan kekurangan sarana-prasarana pendidikan. Dinas Pendidikan mendorong sekolah-sekolah melaksanakan regrouping dalam mengefektifkan tenaga serta sarana-prasarana penunjang pelaksanaan belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Akadum, (1999) Potret Guru Memasuki Milenium Ketiga. *Suara Pembaharuan*.
(Online) (<http://www.suara-pembaharuan.com/News/1999/01/220199/OpEd>,
Diakses Tanggal 27 Juli 2003).
- Arifin, I (2000) Profesionalisme Guru: Analisis Wacana Reformasi Pendidikan dalam Era Globalisasi. Makalah Simposium Nasional Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, 25-26 Juli 2001.
- M. Ahsan, (2001) : Peningkatan Kesejahteraan Guru. *Suara Merdeka* 22 Agustus 2001
- Nasanius, Y (1998) Kemerosotan Pendidikan Kita: Guru dan Siswa yang Berperan Besar, Bukan Kurikulum. *Suara Pembaharuan*. (Online) (<http://www.suara-pembaharuan.com/News/1998/08/230898>, Diakses tanggal 23 Juli 2003)
- Sumargi, (1996) Profesi Guru Antara Harapan dan Kenyataan. *Suara Guru* No. 3/1996. Hlm. 9-11.
- Supriadi, Dedi, (1998) *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.
- Surya, Mohamad, (2002) *Krisis Pendidikan: Apa yang Salah dengan Guru dan Pendidikan Guru di Indonesia (Makalah)*. Disampaikan dalam Konferensi Nasional Manajemen Pendidikan. Universitas Negeri Jakarta bekerjasama dengan Himpunan Sarjana Administrasi Pendidikan Indonesia.
- Tilaar, H.A.R (2001) *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Bio Data

Sufyarma Marsidin. Lahir di IV Angkat Candung Kabupaten Agam tanggal 9 Februari 1954. Menamatkan Pendidikan Sarjana Muda Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris FKSS IKIP Padang, Sarjana Pendidikan Jurusan Administrasi dan Supervisi Pendidikan FIP IKIP Bandung, Magister Pendidikan Fakultas Pascasarjana IKIP Bandung dan Doktor Pendidikan IKIP Bandung. Pengalaman kerja, terdiri dari : (1) Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP Univ.Negeri Padang, (2) Matan Staf Ahli PR I IKIP Padang, (3) Mantan Staf Ahli Rektor IKIP Padang, (4) Matan PD I FIP IKIP Padang, (5) Matan Anggota DPRD Tk. I Sumatera Barat dan (6) Dekan FIP UNP untuk periode Tahun 2003-2007.

Nama : Dr.Firman.MS. Lahir tanggal 25 Februari 1961. Manamatkan pendidikan SD Koto Tuo, SMP Negeri IV Bukittinggi, SPG Negeri Bukittinggi, Sarjana Pendidikan Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP IKIP Padang, Magister Psikologi Sosial Univ.Padjadjaran Bandung, dan Doktor Ilmu Sosial Univ.Airlangga Surabaya.